



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP) TAHUN 2018**

PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 serta dictum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satuan Kerja Mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PA/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

Pada Tahun 2017 Program yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar mengacu pada Rencana Strategis tahunan pertama yang dimulai dilaksanakan tahun 2015. Beberapa Program yang dilaksanakan tahun ini adalah Peningkatan Penyelesaian Perkara yang sederhana, Tertib, tepat waktu dan akuntabel, Penyediaan dana Pelayanan Hukum, Pemberian Uang Makan terdakwa Peningkatan Sumber Daya Manusia, Penyediaan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai serta Pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Dengan adanya Reviu Rencana Strategis tahun ini sehingga terdapat beberapa koreksi dalam rangka perencanaan dan Pelaporan yang lebih baik.

Demikian diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) ini dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Program dan bahan untuk melakukan Evaluasi untuk tahun-tahun yang akan datang pada Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Umumnya.

Karanganyar, 29 Januari 2019

Pengadilan Negeri Karanganyar

Sekretaris



Y. Agus Susanto, SH

NIP. 196710182002121002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah Akuntabilitas. Ide dasar Akuntabilitas adalah Jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum Organisasi atau Institusi harus akutabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan system Administrsai dan Struktur Organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu Organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses Perencanaa namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasa, serta pada pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran kinerja dalam lingkungan Institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP).

Di lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Karanganyar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Tahun 2018 ini menyajikan Capaian Kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Karanganyar selama Tahun 2018 yang merupakan Pelaksanaan amanah yang diemban oleh Organisasi. Walaupun Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun Suatu Laporan Akuntaabilitas, namun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi Kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

<i>Halaman Judul</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Ikhtisar Eksekutif</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iv</i>
<i>Bab I Pendahuluan</i>	
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Tugas dan Fungsi</i>	<i>1</i>
<i>Bab II Perencanaan dan Penyajian Kinerja</i>	
<i>A. Rencana Strategis</i>	<i>9</i>
<i>B. Rencana Kinerja</i>	<i>11</i>
<i>Bab III Akuntabilitas Kinerja</i>	
<i>A. Capaian Kinerja Organisasi</i>	<i>15</i>
<i>B. Relaisasi Anggaran</i>	<i>37</i>
<i>Penutup</i>	<i>41</i>
<i>Lampiran</i>	<i>42</i>

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Karanganyar, mengevaluasi kinerja di tahun 2018 ini. Karena di era kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Karanganyar juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

B. Tugas dan Fungsi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Karanganyar berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Rencana Standar Operasional Prosedur dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Jawa Tengah dibahas di Pengadilan Tinggi Semarang . Hasilnya dijadikan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se - Jawa tengah Yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan berlaku bagi Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Se Jawa Tengah berlaku mulai tahun 2011. Sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang , Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 096-1/SEK/KU.01/4/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Permintaan Standar Operasional Prosedur. Maksud dari surat tersebut agar setiap unit kerja membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengesahannya sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012. Berdasarkan

hal tersebut maka Pengadilan Negeri Karanganyar melakukan revisi Standar Operasional Prosedur beserta lembar pengesahannya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 21 November 2014 untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI.

b. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai yaitu rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh pegawai, mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Karanganyar . Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara herarki. SKP Pengadilan Negeri Karanganyar dari Eselon III sampai dengan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Karanganyar
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- 3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Mengadakan rapat dinas
- 5) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang
- 6) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi
- 7) Mendisposisi surat-surat masuk
- 8) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- 9) Mengadakan pembinaan kepada para pejabat struktural , fungsional, dan seluruh pegawai

- 10) Memberikan tindakan kepada pegawai/pejabat yang melakukan indisipliner sesuai aturan yang berlaku
- 11) Menjalankan Tugas sebagai Hakim
- 12) Mengadakan Koordinasi dengan instansi terkait
- 13) Memantau pelaksanaan semua aplikasi baik CTS/SIPP, SIMAK BMN, SAKPA, Aplikasi Kepegawaian.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar

- 1) Menerima permohonan ijin persetujuan penyitaan/penggeledahan dari penyidik Polri/Kejaksaan dan sekaligus mendisposisi ke Panitera untuk ditindaklanjuti
- 2) Menandatangani penetapan persetujuan ijin penyitaan/penggeledahan dari penyidik/kejaksaan
- 3) Membagi perkara pidana singkat dan sekaligus menetapkan hakimnya
- 4) Membagi perkara pidana cepat/pelanggaran lalu lintas dan sekaligus menetapkan hakimnya
- 5) Membagi perkara perdata permohonan sekaligus menetapkan hakimnya
- 6) Mengadakan evaluasi terhadap hasil pengawasan bidang
- 7) Mengevaluasi laporan absensi
- 8) Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan
- 9) Melaksanakan tugas sebagai Hakim

3. Panitera

- 1) Meneliti, mengarahkan dan menindaklanjuti surat-surat masuk bagian Kepaniteraan
- 2) Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Bagian Kepaniteraan
- 3) Meneliti kelengkapan perkara perdata dan pidana yang diterima
- 4) Membuat surat penunjukan panitera pengganti untuk melaksanakan persidangan
- 5) Meneliti permohonan ijin penyitaan, penggeledahan dan penahanan
- 6) Melegalisasi salinan penahanan dan perpanjangan penahanan

- 7) Menerima, meneliti dan menindaklanjuti ijin penyitaan, sita eksekusi dan eksekusi
- 8) Menandatangani pendaftaran surat kuasa dan akta badan hukum
- 9) Menandatangani surat keterangan
- 10) Melegalisasi salinan putusan dan petikan putusan
- 11) Menandatangani surat tugas kejurusitaan
- 12) Melaksanakan tugas sebagai PPID
- 13) Menkoordinasi pelaksanaan aplikasi CTS/SIPP, SIWAS MA-RI dan Direktori Putusan

4. Sekretaris

- 1) Meneliti, mengarahkan dan menindaklanjuti surat-surat masuk Bagian Kesekretariatan
- 2) Menandatangani Rekening
- 3) Mengkoordinasikan perkiraan, penyerapan dan realisasi DIPA
- 4) Menghimpun masukan-masukan dari kesekretariatan dan kepaniteraan guna penyusunan RKA-KL DIPA
- 5) Meneliti persyaratan kenaikan pangkat, KGB, jabatan dan pensiun
- 6) Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
- 7) Melaksanakan tugas sebagai PPID
- 8) Menkoordinasi pelaksanaan aplikasi SIMAK BMN, SAKPA, dan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Panitera Muda Pidana

- 1) Menerima, meneliti, menandatangani penerimaan berkas perkara pidana dari JPU
- 2) Menerima, meneliti, limpahan berkas perkara Pelanggaran lalu lintas dari polres
- 3) Menerima, meneliti, menandatangani penerimaan berkas perkara pidana cepat dari Polres
- 4) Menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan iji Sita/ Penggledahan dari penyidik

- 5) Memberi paraf penetapan ijin sita/ penggledahan
- 6) Menandatangani pengiriman salinan putusan pidana

7. *Panitera Muda Perdata*

1. Menerima pendaftaran perkara Perdata : Permohonan, Gugatan, Perlawanan
2. Menerima pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi
3. Menentukan penaksiran panjar biaya perkara yg didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang tarif / Panjar biaya perkara : Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Upaya Hukum dan Eksekusi.
4. Melakukan evaluasi penyelesaian register perkara Perdata : Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, PK yang dikerjakan oleh pemegang buku Register
5. Mengelola berkas perkara (AKTIF) / Upaya Hukum
6. Membagi tugas Jurusita yang akan melaksanakan tugas kejurusitaan.
7. Mengontrol pengelolaan keuangan ATK Perdata

8. *Panitera Muda Hukum*

1. Meneliti dan memaraf Laporan Bulanan tentang keadaan perkara Pidana dan Perkara Perdata
2. Menerima dan memaraf Pendaftaran Akta Badan Hukum (ABH)
3. Menerima dan memaraf Pendaftaran Surat Kuasa baik Pidana maupun Perdata
4. Meneliti dan memaraf Surat Keterangan
5. Menerima dan menandatangani minutas berkas perkara Pidana dan Perdata innaktif
6. Menerima dan melayani Mahasiswa Riset / Penelitian.
7. Menerima dan melayani Pemohon informasi / Pengaduan
8. Meneliti dan memaraf Laporan Triwulanan tentang pengaduan
9. Meneliti dan memaraf Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
10. Melaksanakan Aplikasi CTS/SIPP

9. Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan

1. Membuka surat masuk dan memberi paraf pada amplop
2. Membuat konsep surat tanggapan urusan keuangan sesuai disposisi pimpinan
3. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Membuat konsep surat tanggapan urusan umum sesuai disposisi pimpinan
5. Memeriksa dan memberi paraf laporan bulanan urusan umum
6. Memeriksa dan memberi paraf surat urusan umum
7. Melakukan pengontrolan keamanan dan kebersihan kantor
8. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor dan inventaris kantor
9. Membuat surat penunjukan penggunaan BMN
10. Meneliti laporan semesteran dan tahunan SIMAK BMN
11. Mengevaluasi dan koordinasi persediaan ATK dan Kebutuhan sehari-hari kantor
12. Mengusulkan pengadaan / belanja barang persediaan
13. Membantu Ketua dalam menyusun program kerja tahunan
14. Mengkoordinir surat keluar dan surat masuk
15. Memeriksa dan memberi paraf laporan SAI/SAKPA

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Meneliti dan memberi paraf usulan kepegawaian
- 2) Meneliti dan mengoreksi Aplikasi kepegawaian
- 3) Meneliti dan memberi paraf Bezeting tenaga teknis dan non teknis
- 4) Meneliti dan memeriksa arsip kepegawaian
- 5) Meneliti dan memberi paraf laporan bulanan dan triwulan

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);
2. Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Menyusun konsep Pentapan Kinerja Tahunan (PKT), Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
4. Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
5. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam *website*;
6. melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;
7. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
8. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
9. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006;
10. Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
11. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
12. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;
13. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
14. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP

12. Fungsional

a. Hak i m

- 1) Menerima dan mempelajari berkas perkara pidana biasa dan singkat
- 2) Menerima dan mempelajari berkas perkara pidana cepat
- 3) Menerima dan mempelajari berkas pelanggaran lalu lintas
- 4) Menerima dan mempelajari berkas perdata gugatan
- 5) Menerima dan mempelajari berkas perdata permohonan
- 6) Melaksanakan persidangan perkara (pidana dan perdata)

- 7) Musyawarah majelis untuk putusan perkara (pidana dan perdata)
- 8) Menyusun putusan (pidana dan perdata)
- 9) Minutering perkara (pidana dan perdata)
- 10) Memasukan penetapan hari sidang dalam CTS/SIPP
- 11) Memasukan putusan dalam CTS/SIPP

b. Panitera Pengganti

- 1) Menerima berkas /menyerahkan ke Majelis Hakim
- 2) Membuat Penetapan Penahanan
- 3) Membuat Penetapan Hari Sidang
- 4) Mengikuti persidangan
- 5) Membuat berita Acara Persidangan
- 6) Memasukkan Petikan Putusan ke CTS /SIPP
- 7) Mengetik Amar/Petikan Putusan sampai dengan Penandatanganan Majelis
- 8) Menyerahkan berkas perkara (selesai minutasi)

c. Jurusita

- 1) Melaksanakan tugas panggilan sidang perkara perdata gugatan atau permohonan kepada para pihak
- 2) Melaksanakan tugas pemberitahuan isi putusan (putusan tingkat I, Banding, Kasasi, PK, Grasi)
- 3) Melaksanakan tugas pemberitahuan permohonan upaya hukum baik banding, kasasi, PK, grasi dan pra peradilan
- 4) Melaksanakan tugas pemberitahuan dan penyerahan Memori dan Kontra Memori perkara upaya hukum
- 5) Melaksanakan tugas pemberitahuan untuk mempelajari mempelajari berkas perkara
- 6) Melaksanakan tugas pemberitahuan anmaning, sita, pengosongan Melaksanakan Eksekusi, Penyitaan, Pengosongan
- 7) Membuat Berita Acara Eksekusi, Penyitaan, Pengosongan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis merupakan Pedoman untuk menyelaraskan antara Visi dan misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk Akuntabilitas Kinerja, Rencana Strategis ini berisi Visi dan misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut. Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai salah satu kepanjangan tangan Mahkamah Agung mempunyai visi dan misi sebagai :

Visi : “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Karanganyar Yang Agung ”.

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Karanganyar ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan ;
3. Meningkatkan Kualitas epemimpinan di Pengadilan Negeri Karanganyar ;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Karanganyar

Rencana Strategis sejalan apa yang telah digariskan dari Mahkamah Agung adalah serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/ berkesinambungan dan strategi yang efektif. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Karanganyar adalah :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Memelihara kepercayaan publik dengan tercapainya butir 1 dan 2

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pengadilan Negeri Karanganyar menjabarkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable

Program Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable terdiri dari beberapa Indikator Kinerja, antara lain :

- a. Presentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan
- b. Presentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Presentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana

- d. Presentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak melakukan upaya hukum
 - e. Presentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdiri dari beberapa Indikator Kinerja, antara lain :
- a. Presentase isi putusan perkara Perdata dan Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Presentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi
 - c. Presentase berkas perkara Perdata dan Pidana yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 - d. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Program Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari beberapa Indikator Kinerja, antara lain :
- a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
 - c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Program Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki indikator kinerja yaitu : Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Instansi Vertikal Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Kabupaten merupakan bagian dari Lembaga Peradilan Umum mempunyai Tugas Inti menerima, memeriksa, mengadilkan dan memutus Perkara Perdata Perkara Pidana di lingkungan tingkat pertama.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Karanganyar Tahun 2015 – 2019 Program Utama yang diambil Pengadilan Negeri Karanganyar adalah :

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Karanganyar didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 yaitu :

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2018

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan - Perdata - Pidana	100 %
		b. Presentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Presentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 %
		d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Perdata - Pidana	100 %
		e. Presentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan dengan Diversi	100 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 %
		f. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Perdata	100 %
		g. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Perdata - Pidana	100 %
		h. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %

		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100 %

C. Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2018

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen Pernyataan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasa dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencatumkan sasaran Strategis Indikator Kinerja beserta kinerja beserta target dan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan : - Perdata (Gugatan, Permohonan, Eksekusi) - Pidana Biasa	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)
	b. Presentase Perkara : - Perdata (Gugatan, Permohonan, Eksekusi) - Pidana Biasa	100 %			2. Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 3. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan 4. Jumlah Perkara PHI (di Bawah 150 Juta) di Lingkungan Peradilan Umum 5. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)
	c. Presentase Penurunan Sisa Perkara : - Perdata (Gugatan, Permohonan, Eksekusi) - Pidana Biasa	100 %			6. Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten di Bidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP 7. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara Tepat Waktu	100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)
	d. Presentase Perkara yang Tidak Melakukan Upaya Hukum : - Perdata (Banding, Kasasi, PK) - Pidana (Banding, Kasasi, PK)	100 %			8. Penyelesaian Perkara Perikanan 9. Pelaksanaan SPPT/SPPA/Mediasi/SCC	100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)

	e. Presentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %				100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)	
	f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100 %				100 %	-	
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan : - Perdata (Gugatan, Permohonan, Eksekusi - Pidana Biasa	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)	
	b. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi - Perdata (Gugatan)	100 %			2. Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum			
	c. Presentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu - Perdata (Gugatan) - Pidana (Biasa)	100 %			3. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan			
	d. Presentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian				4. Jumlah Perkara PHI (di Bawah 150 Juta) di Lingkungan Peradilan Umum	100 %	-	
					5. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaiakan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	100 %	Rp. 168.200.000 (Pidana)	
					6. Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten di Bidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP			
					7. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara Tepat			

	Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam waktu 1 Hari setelah Diputus	100 %			Waktu 8. Penyelesaian Perkara Perikanan 9. Pelaksanaan SPPT/SPPA/Mediasi/SCC	100 %	-
3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Presentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>b. Presentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum</p>	<p>100 %</p> <p>-</p> <p>100 %</p>	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<p>1. Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>2. Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum</p> <p>3. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>4. Jumlah Perkara PHI (di Bawah 150 Juta) di Lingkungan Peradilan Umum</p> <p>5. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara</p> <p>6. Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten di Bidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP</p> <p>7. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara Tepat Waktu</p> <p>8. Penyelesaian Perkara Perikanan</p> <p>9. Pelaksanaan SPPT/SPPA/Mediasi/SCC</p>	100 %	<p>Rp. 1.580.000</p> <p>-</p>

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum 2. Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 3. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan 4. Jumlah Perkara PHI (di Bawah 150 Juta) di Lingkungan Peradilan Umum 5. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara 6. Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten di Bidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP 7. Perkara Peradilan Umum yang di Selesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara Tepat Waktu 8. Penyelesaian Perkara Perikanan 9. Pelaksanaan SPPT/SPPA/Mediasi/SCC 	-	-
---	---	-------	--	--------------------------------------	---	---	---

BAB III
AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran/capaian kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, Pengukuran kinerja ini dilakukan Instansi pada setiap berakhir tahun periode. Hal ini untuk mengetahui capaian kinerja Organisasi dari target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka pencapaian Rencana kerja/ sasaran kerja.

Berikut adalah table pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, Indikator kinerja target yang direncanakan beserta reaksi pada akhir tahun 2018 di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Karanganyar, dari table akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan/target yang direncanakan.

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2018, berikut disampaikan terlebih dulu Rekapitulasi Perkara selama tahun 2018 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama 1 (satu) tahun.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana dalam Tahun 2018 Pengadilan Negeri Karanganyar

NO	PERKARA PIDANA	JUMLAH			PROSENTASE PENYELESAIAN	
		Biasa	Singkat	Khusus (Anak)		
1.	Sisa Tahun 2017	47	0	1	Perkara Pidana Biasa	86 %
2.	Masuk dalam Tahun 2018	202	10	6	Perkara Pidana Singkat	100 %
3.	Putus Tahun 2018	216	10	7	Perkara Pidana Khusus	100%
4.	Perkara Banding	26	0	0		
5.	Perkara Kasasi	14	0	0		
6.	PK. Peninjauan Kembali	0	0	0		
7.	Perkara Grasi	0	0	0		

NO.	PIDANA CEPAT / RINGAN/ LALULINTAS	JUMLAH		PROSENTASE PENYELESAIAN
		Cepat/Ringan	Lalu lintas	
1.	Sisa Tahun 2017	0	0	
2.	Masuk dalam Tahun 2018	124	42.366	Perkara Pidana Cepat 100%
3.	Putus Tahun 2018	124	42.366	Perkara Lalu Lintas 100%

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata dalam Tahun 2018 Pengadilan Negeri Karanganyar

NO.	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Sisa Tahun 2017	39	Perkara Gugatan 78 %
2.	Masuk dalam Tahun 2018	117	
3.	Putus Tahun 2018	123	
4.	Perkara Perada Banding	23	
5.	Perkara Perdata Kasasi	12	
6.	PK. Peninjauan Kembali	1	
7.	Eksekusi	10	
8.	Konsinyasi	6	

NO.	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Sisa Tahun 2017	9	Permohonan 92 %
2.	Masuk dalam Tahun 2018	259	
3.	Putus Tahun 2018	248	

NO.	PERKARA PERDATA MEDIASI	JUMLAH	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Jumlah Perkara yang di Mediasi	73	Mediasi 8 %
2.	Jumlah Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian	6	

NO.	WAKTU PENGANGANAN PERKARA PERDATA	JUMLAH	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Perkara yang selesai dalam waktu 5 bulan	102	92 %
2.	Perkara yang selesai dalam waktu lebih 5 bln.	12	10 %

NO.	PERKARA PERDATA EKSEKUSI	JUMLAH	PROSENTASE PENYELESAIAN
1.	Permohonan Eksekusi	23	Permohonan 43 %
2.	Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti	10	

Tabel 3. Rasio Hakim Terhadap Perkara Tahun 2018.

No.	Jumlah Majelis Hakim Tahun 2018	Jumlah Perkara yang ditangani Majelis Hakim Tahun 2017	Perbandingan Rata-Rata Majelis Terhadap Perkara
1.	3 (Tiga) Hakim Majelis	Perkara Perdata : 117	39
		Perkara Pidana : 202	68

Dengan rata-rata Jumlah Majelis 3 (Tiga) selama tahun 2018. Maka untuk perkara Perdata masing-masing majelis menangani 39 perkara selama 1 (satu) tahun, dan Perkara Pidana masing-masing majelis Hakim rata-rata menangani 68 perkara dalam 1 (satu) tahun.

Dari Jumlah tersebut jika di bandingkan dengan target kinerja sesuai dengan rencana Strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri Karanganyar akan diperoleh data sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	- 36	- 39	- 108 %
		- Perdata	- 31	- 47	- 151 %
		- Pidana			
		b. Presentase Perkara :			
		- Perdata	- 416	- 371	- 89 %
		- Pidana	- 247	- 216	- 86 %
		Yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Presentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	- 11	- 11	- 100 %
		- Pidana	- 30	- 30	- 100 %

		d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Perdata - Pidana	- 74 - 201	- 100 - 193	- 135 % - 91 %
		e. Presentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan dengan Diversi	1	0	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79,59	80,27	108 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	- 378 - 205	- 371 - 216	- 98 % - 105 %
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Perdata	10	6	60 %
		c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Perdata - Pidana	- 23 - 26	- 23 - 26	- 100 % - 100 %
		d. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	- 700	- 643	- 91 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	100 %
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	100 %
		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	50	56	112 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	23	10	43 %

Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan Ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Terdapat 4 (empat) kinerja utama yang didalamnya terdapat Indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja.

Berdasar pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable

Sasaran tersebut terdapat beberapa Indikator kerja diantara :

a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana pada tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018. Sisa perkara perdata gugatan pada Tahun 2017 sebanyak 39 perkara, sisa perkara perdata permohonan pada Tahun 2017 sebanyak 9 perkara dan Sisa perkara pidana pada Tahun 2017 sebanyak 47 perkara. Sisa perkara perdata gugatan tahun 2017 yang berhasil diselesaikan tahun 2018 sebanyak 39 perkara, Sisa perkara perdata permohonan tahun 2017 yang berhasil diselesaikan tahun 2018 sebanyak 9 perkara dan Sisa perkara pidana tahun 2017 yang berhasil diselesaikan tahun 2018 sebanyak 47 perkara.

Dengan demikian tingkat capaian keberhasilan penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana adalah 100 % sehingga sudah sesuai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Target digambarkan sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian %</i>
Prosentase penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2017	48	48	100
Prosentase penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2018	47	47	100

Proses capaian adalah perbandingan antara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2018 : $48 / 48 \times 100\% = 100\%$ sehingga pencapaian target penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2018 Indikator ini adalah 100 %. Dan penyelesaian sisa perkara

pidana tahun 2017 : $47 / 47 \times 100\% = 100\%$ sehingga pencapaian target penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2017 Indikator ini adalah 100 %.

b. Prosentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 100 % dari Jumlah Perkara Perdata dan Pidana tahun 2018, sehingga prosentase realisasi untuk penyelesaian perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2018 mencapai tingkat capaian 95 %

Pencapaian Target digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan.	378	371	98
Prosentase Perkara Pidana yang diselesaikan.	249	216	86

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian penyelesaian perkara perdata tahun 2018 : $371 / 378 \times 100\% = 98\%$ sehingga pencapaian target Penyelesaian Perkara Perdata belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dan penyelesaian perkara pidana tahun 2018 : $216 / 249 \times 100\% = 86\%$ sehingga pencapaian target Penyelesaian Perkara Pidana belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan

c. Prosentase Penurunan Sisa Perkara

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 100 % dari Jumlah Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Pidana tahun 2017, sehingga prosentase realisasi untuk Penurunan Sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2018 adalah tingkat capaian 100 %

Pencapaian Target digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Penurunan Sisa Perkara Perdata	6	6	100
Prosentase Penurunan Sisa Perkara Pidana	16	16	100

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $100 / 100 \times 100\% = 100\%$ sehingga pencapaian target Penyelesaian Penurunan Sisa Perkara dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Prosentase Perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 100 % dari Jumlah Perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2017. Sebanyak 100 perkara Perdata tidak melakukan upaya hukum, dan 190 perkara pidana tidak melakukan upaya, sehingga prosentase realisasi untuk perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2018 adalah tingkat capaian 102%

Pencapaian Target digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum	182	190	104
Prosentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum	102	100	98

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $290 / 284 \times 100\% = 102\%$ sehingga pencapaian target Perkara Perdata dan Pidana tahun 2018 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

e. Prosentase Perkara Peradilan Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 1 perkara yang merupakan realisasi perkara pada tahun 2017. Jumlah Perkara Peradilan Anak yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2018 sebanyak 0 perkara sehingga prosentase realisasi untuk perkara peradilan Anak yang Diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2018 adalah tingkat capaian 0 %

Pencapaian Target digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Perkara Peradilan Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	0	0

Proses capaian adalah perbandingan anatara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $0 / 1 \times 100\% = 0\%$ sehingga pencapaian target Indikator ini tingkat capaiannya sebesar 0 % sehingga capainya belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal itu dikarenakan belum ada perkara anak yang ditangani melalui diversi.

f. *Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan*

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah realisasi dari tahun 2017 dengan nilai 79,59. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2018 sebanyak 80,27, sehingga prosentase Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2018 adalah tingkat capaian 108%

Pencapaian Target digambarkan sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisai</i>	<i>Capaian %</i>
Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	79,59	80,27	108

Prosentase capaian adalah perbandingan anatara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2017, dengan demikian : $80,27 / 79,59 \times 100\% = 108\%$ sehingga pencapaian target tingkat Pencapaian sebesar 108 % sehingga dapat melebihi target yang ditetapkan.

2. *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Untuk mengetahui pencapaian tingkat Efektifitas Pengelolaan Perkara terdapat 4 (empat) Indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaras adalah.

a. *Presentase Isi Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu*

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 378 perkara perdata dan 2015 perkara pidanan yang merupakan realisasi dari tahun 2017. Jumlah perkara Perdata sebanyak 371 perkara yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga realisasi untuk Indikator ini pada akhir 2018 adalah 98%. Jumlah

perkara Pidana sebanyak 216 perkara yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga realisasi untuk Indikator ini pada akhir 2018 adalah 105%.

Pencapai target digambarkan sebai berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Isi Putusan Perkara Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	378	371	98
Prosentase Isi Putusan Perkara Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	205	216	105

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $578 / 583 \times 100\% = 99\%$ sehingga pencapaian target Isi Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2018 sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 4 perkara yang merupakan realisasi tahun 2017. Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 6 perkara, sehingga realisasi untuk Indikator ini pada akhir 2018 adalah 150%.

Pencapai target digambarkan sebai berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi	3	6	150

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $6 / 3 \times 100\% = 200\%$ sehingga pencapaian taerget Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2018 dalam Indikator ini sebesar 150 % sehingga capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan.

c. Prosentase Berkas Perkara Perdata dan Pidana yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 30 perkara perdata dan 23 perkara pidana yang merupakan realisasi dari tahun 2017. Jumlah berkas perkara Perdata sebanyak 36 perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu dan Jumlah berkas perkara Pidana sebanyak 41 perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi untuk Indikator ini pada akhir 2018 adalah 145 %

Pencapai target digambarkan sebai berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	30	36	120
Prosentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	23	41	178

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian untuk perkara perdata : $36 / 30 \times 100\% = 120\%$ sehingga pencapaian target Berkas Perkara Perdata yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat waktu Indikator ini tingkat capaian sebesar : 120 % sudah melebihi target yang telah ditetapkan dan pencapaian target Berkas Perkara Pidana yang diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat waktu Indikator ini tingkat capaian sebesar : $41/23 = 178\%$ sudah melebihi target yang telah ditetapkan

d. Prosentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 589 perkara yang merupakan realisasi dari tahun 2017. Jumlah Putusan perkara Perdata yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2018 sebanyak 371 perkara. Jumlah Putusan perkara Pidana yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2018 sebanyak 216 perkara, sehingga realisasi untuk Indikator ini pada akhir 2018 adalah 99 %.

Pencapai target digambarkan sebai berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Putusan perkara Perdata yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	378	371	98
Putusan perkara Pidana yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	211	216	102

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $587 / 589 \times 100\% = 99\%$ sehingga pencapaian target Putusan perkara Perdata yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2018 dalam Prosentase Indikator ini sebesar 99% sehingga capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan pencapaian target Putusan perkara Pidana yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus Tahun 2018 dalam Prosentase Indikator ini sebesar 99% sehingga capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdapat beberapa Indikator untuk mengukur, Indikator tersebut adalah :

a. Prosentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017. Sebanyak 0 perkara perdata prodeo diselesaikan, sehingga Prosentase realisasi untuk Indikator ini adalah 0 %.

Pencapai target digambarkan sebai berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisai	Capaian %
Prosentase Prodeo yang diselesaikan	0	0	100

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $0 / 0 \times 100\% = 100\%$ sehingga pencapaian target Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 memnuhi target yang telah ditetapkan.

b. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 100% dari jumlah berkas perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan selama Tahun 2017 sebanyak : 0 berkas perkara sehingga Prosentase realisasi untuk Indikator ini adalah 100 %

Pencapai target digambarkan sebagai berikut

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisai</i>	<i>Capaian %</i>
Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0	0	100

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $0 / 0 \times 100\% = 100\%$ sehingga pencapaian target Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan Tahun 2018 tingkat pencapaian Indikator ini dapat memenuhi target.

c. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah Prosentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum pada tahun 2018. Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum Tahun 2018 sebanyak 56, sehingga Prosentase Relaisasi untuk Indiakator ini 112%.

Pencapai target diganbarkan sebai berikut

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisai</i>	<i>Capaian %</i>
Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Bantuan Hukum	50	56	112

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $56 / 50 \times 100\% = 112 \%$ sehingga pencapaian Indikator belum memenuhi target.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan terdapat beberapa Indikator untuk mengukur, Indikator tersebut adalah :

Prosentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah Prosentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2018 yaitu 15 perkara. Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2018 sebanyak 10 sehingga Prosentase Relaisasi untuk Indiaktor ini 62 %.

Pencapai target digambarkan sebai berikut

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian %</i>
Prosentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	15	10	66

Prosentase capaian adalah perbandingan anantara target dengan Realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian : $10 / 15 \times 100\% = 66 \%$ sehingga pencapaian Indikator belum memenuhi target.

B. Realisasai Anggaran

Selain Pertanggungjawaban dalam hal teknis/funsional Pengadilan Negeri Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya didukung ooleh Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Pengadilan Negeri Karanganyar telah mendapat alokasi Anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

01. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrsai 01 ;
02. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Peradilan Umum 03 ;

01. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 01

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yaitu :
- Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dengan detail kegiatan : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Koordinasi, Konsultasi, Perjalanan Dinas ke KPPN dan Kanwil
 - Layanan Perkantoran dengan detail kegiatan : Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi : Kebutuhan sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Operasional Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yaitu : Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.

Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Karanganyar mendapatkan alokasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar : ***Rp. 10.015.081.000 (sepuluh miliar lima belas juta delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :***

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung.

<i>No,</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian %</i>
01.	Gaji dan Tunjangan	3.985.186.000	3.918.266.195	98,33 %
02.	Belanja Barang Operasional	337.452.000	337.377.074	99,98 %
03.	Belanja Barang Persediaan	56.200.000	56.199.450	99,99 %
04.	Belanja Jasa	133.872.000	128.885.159	96,27 %
05.	Belanja Pemeliharaan	313.546.000	313.487.326	99,98 %
06.	Belanja Barang Non Operasional	5.114.000	4.700.000	91,90 %
07.	Belanja Perjalanan Dinas	82.200.000	81.716.250	99,41%
	Total Belanja	4.913.570.000	4.840.631.454	98,53 %

Pada Program dukungan Manajemen dan Pelaksanan tugas teknis lainnya, dari alokasi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp. 4.913.570.000 capaian relaisasi sebesar : Rp. 4.840.631.454 dengan demikian capaian Indikator sebesar 98,53 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No,	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %
01.	Belanja Modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	4.773.000.000	4.772.119.000	99,98 %
02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	192.500.000	192.300.000	99,99%
03.	Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	207.500.000	205.475.300	99,02 %
	Total Belanja	5.173.000.000	5.169.894.300	99,94 %

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dari alokasi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp. 5.173.000.000 capaian realisasi sebesar : Rp. 5.169.894.300 dengan demikian capaian Indikator sebesar 99,94 %.

02. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 03 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk kegiatan dengan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2018 mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar : **Rp. 169.780.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

No,	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %
01.	Belanja Jasa Konsultasi	31.200.000	31.039.920	99,49 %
02.	Belanja Barang Operasional	3.000.000	2.990.000	99,67 %
03.	Belanja Barang Non Operasional	61.750.000	60.325.100	97,69 %
04.	Belanja Barang Persediaan	52.500.000	50.170.550	95,56 %
05.	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000	17.354.000	87,87 %
06.	Belanja Prodeo	1.580.000	0	0 %
	J U M L A H	169.780.000	161.879.570	95,35 %

Pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dari alokasi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp. 169.780.000,- pencapaian realisasi sebesar : Rp. 161.879.570,- dengan demikian capaian Indikator sebesar 95,35%

03. Pengelolaan Keuangan Perkara Perdata

Keadaan Keuangan Perkara Perdata Sampai tanggal, 30 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Posisi Keuangan Pihak Ketiga

<i>No,</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
01.	Sisa Akhir Tahun 2017	110.481.890,-
02.	Penerimaan Tahun 2018	433.264.000,-
03.	Pengeluaran Tahun 2018	386.069.000,-
	Sisa Akhir Tahun 2018	157.676.890,-

Posisi Keuangan Eksekusi

<i>No,</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
01.	Sisa Akhir Tahun 2017	579.326.516,-
02.	Penerimaan Tahun 2018	150.000.000,-
03.	Pengeluaran Tahun 2018	525.284.616,-
	Sisa Akhir Tahun 2018	204.041.900,-

Posisi Keuangan Konsinyasi

<i>No,</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
01.	Sisa Akhir Tahun 2017	0,-
02.	Penerimaan Tahun 2018	9.962.500.000,-
03.	Pengeluaran Tahun 2018	8.850.344.300,-
		1.112.155.700,-
	Sisa Akhir Tahun 2018	1.112.155.700,-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Pengadilan Negeri Karanganyar Tahun 2018 ini merupakan bentuk Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjadikan perbandingan antara sasaran yang ditargetkan sebelum tahun 2017 dibandingkan dengan hasil kerja/realisasi yang diukur pada akhir tahun 2018. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misinya menyusun Perencanaan yang lebih akurat dan terpadu mengalokasikan dana setiap kegiatan yang sangat Prioritas dengan mengalokasikan Anggaran merujuk kepada Rencana hasil yang akan diperoleh.

Selanjutnya melalui peningkatan Koordinasi dengan pihak terkait dan peningkatan Profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. dengan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Karanganyar dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Karanganyar Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat dan perkembangan teknologi dan Informasi.

Karanganyar, 04 Januari 2019

Pengadilan Negeri Karanganyar

Sekretaris

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar



MUJIQNO, SH, MH

NIP. 19641004 199603 2 001

Y. AGUS SUSAMTO, SH

NIP. 19671018 200212 1 002

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Nomor: 31 /SK/KPN.07.01/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2018, DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2020 PADA LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran dinas dalam penyusunan LKjIP tahun 2018, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2020 pada Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar, maka perlu dibentuk adanya Suatu Tim dalam Penyusunan tersebut.
- MENINGAT** : Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP 2018 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Rencana inerja Tahun 2020 pada lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar.
- KEDUA** Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Karanganyar

Tanggal : 31 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II



MUJONO, SH., MH.

NP. 19670728 199603 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
NOMOR : 31 /SK/KPN.07.01/XII/2018
TANGGAL : 31 Desember 2018

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENYUSUN	KETERANGAN
1	RATIH DEWANTI, SH. NIP. 196105091981031001	Penata Tk.I III/d	Panitera	Ketua	
2	YUSTINUS AGUS SUSAMTO, SH. NIP. 196710182002121002	Penata Tk.I III/d	Sekretaris	Sekretaris	
2	AGUS DWIYANTO, SH. NIP. 197208091993031001	Penata Tk.I III/d	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	Anggota	
3	MUH. ZAKARIM, SH. NIP. 196310121985031005	Penata Tk.I III/d	Panitera Muda Hukum	Anggota	
4	SRI LESTARI, SH. NIP. 195902131980122001	Penata Tk.I III/d	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5	SRI MULYANTO, SH. NIP. 196707051986031006	Penata Tk.I III/d	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6	BAMBANG SUPRIYANTA, SH. NIP. 196709051990031002	Penata III/c	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	
7	SURYA KUSUMA, SE. NIP. 198605072011011010	Penata Muda III/a	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota	

Ditetapkan di : Karanganyar
Tanggal : 31 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II


MUJIONO, SH., MH.
NIP. 19670728 199603 1 001